

**STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR DESA DALAM
PENYUSUNAN RKPDES MELALUI PENDEKATAN PARTISIPATIF DAN
TRANSPARAN DI DESA SELEBUNG, BATUKLIANG**

Andi Muhammad Fu'ad

Institut Agama Islam Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*email (muhammadrizalhamdi.stisda@gmail.com)

Abstrak: Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan desa yang efektif dan akuntabel. Namun, rendahnya kompetensi aparatur desa sering menjadi kendala dalam penyusunan RKPDes yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pendekatan partisipatif dan transparansi dalam penyusunan RKPDes di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan transparan mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta akuntabilitas aparatur desa dalam menyusun RKPDes. Keterlibatan aktif masyarakat dan keterbukaan informasi menjadi faktor kunci dalam mewujudkan perencanaan desa yang responsif dan partisipatif.

Kata kunci: Kompetensi Aparatur, RKPDes, Pendekatan Partisipatif, Transparansi, Perencanaan Desa

Abstract: The preparation of the Village Government Work Plan (RKPDes) is an integral part of effective and accountable village development planning. However, the low competency of village officials often becomes an obstacle in producing quality RKPDes. This study aims to analyze strategies for improving the competency of village officials through participatory and transparent approaches in the preparation of RKPDes in Selebung Village, Batukliang Subdistrict, Central Lombok Regency. This research employs a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, participatory observations, and documentation. The results show that participatory and transparent approaches enhance the understanding, skills, and accountability of village officials in preparing RKPDes. Active community involvement and information openness are key factors in realizing responsive and participatory village planning.

Keywords: Apparatus Competence, RKPDes, Participatory Approach, Transparency, Village Planning

Article history: Received : 01/01/2024 Approved : 01/02/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jp m
---	--

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan desa merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan nasional. Salah satu instrumen utama dalam proses ini adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang menjadi pedoman arah pembangunan tahunan di tingkat desa. RKPDes disusun berdasarkan musyawarah desa dengan melibatkan berbagai unsur

masyarakat, sebagai bentuk perwujudan demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penyusunan RKPDes masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan kapasitas dan kompetensi aparatur desa. Banyak aparatur desa yang belum memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam menyusun dokumen perencanaan, baik dari aspek substansi maupun teknis administratifnya (Supriadi, 2020). Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas dokumen RKPDes dan tidak sinkronnya dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMDes dan APBDes.

Selain itu, minimnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RKPDes juga menjadi persoalan serius. Banyak desa yang masih menerapkan pendekatan top-down dalam menyusun rencana kerja, sehingga usulan masyarakat tidak terakomodasi secara optimal. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan prinsip utama dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Moleong, 2021).

Di sisi lain, transparansi dalam proses perencanaan juga belum sepenuhnya terlaksana. Keterbukaan informasi mengenai tahapan penyusunan, hasil musyawarah, dan prioritas kegiatan masih kurang, sehingga menimbulkan potensi kecurigaan dan konflik di masyarakat (Fitriyani, 2019). Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dan transparan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas penyusunan RKPDes sekaligus meningkatkan kompetensi aparatur desa secara berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai salah satu desa yang tengah berupaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis masyarakat. Dengan latar belakang ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pendekatan partisipatif dan transparansi dalam penyusunan RKPDes. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu; (1) Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun RKPDES yang berbasis partisipatif dan transparansi. (2) Memberikan pendampingan kepada aparatur desa dalam memahami prinsip-prinsip perencanaan desa yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat. (3) Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan RKPDES agar dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat Desa Selebung. (4) Mengembangkan model pendampingan yang dapat direplikasi di desa lain dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan desa. Dengan pendekatan ini, diharapkan aparatur desa dapat menyusun RKPDES yang lebih berkualitas, transparan, dan partisipatif, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Metode

Metode yang digunakan dalam program pengabdian ini adalah *Participatory Action Research* (PAR) dan Pendampingan Partisipatif Berbasis Transparansi. Metode PAR dipilih karena melibatkan partisipasi aktif aparatur desa dan masyarakat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDES). Pendampingan partisipatif berbasis transparansi digunakan untuk memastikan bahwa proses perencanaan bersifat inklusif, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Sasaran utama program ini adalah aparatur desa di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, yang terdiri dari:

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Tim Penyusun RKPDDES
4. Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Kelompok Masyarakat

Pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa tahapan utama:

1. Tahap Identifikasi dan Pemahaman Masalah yang terdiri dari:
 - a. Observasi awal terhadap kondisi penyusunan RKPDDES di Desa Selebung.
 - b. Diskusi awal dengan aparatur desa dan masyarakat untuk memahami permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan desa.
 - c. Pengumpulan data sekunder terkait perencanaan pembangunan desa sebelumnya.
2. Tahap Pelatihan dan Pendampingan
 - a. Pelatihan mengenai prinsip-prinsip perencanaan desa yang partisipatif dan transparan.
 - b. Pendampingan teknis dalam penyusunan RKPDDES berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
 - c. Simulasi dan praktik langsung penyusunan RKPDDES yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
3. Tahap Implementasi dan Monitoring
 - a. Penyusunan draft RKPDDES oleh tim desa dengan bimbingan fasilitator.
 - b. Forum konsultasi dan validasi dengan masyarakat untuk memastikan keterwakilan dan transparansi.
 - c. Evaluasi proses penyusunan RKPDDES, dengan menilai efektivitas pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu:

1. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara mendalam dengan aparatur desa dan masyarakat.
 - b. Diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) untuk menggali aspirasi masyarakat.
 - c. Kuesioner untuk mengukur pemahaman aparatur desa sebelum dan sesudah pelatihan.
 - d. Observasi langsung dalam penyusunan RKPDES.
2. Teknik Analisis Data
 - a. Analisis deskriptif untuk mengevaluasi perubahan kapasitas aparatur desa.
 - b. Analisis komparatif antara kondisi sebelum dan sesudah pelatihan dan pendampingan.
 - c. Evaluasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDES berdasarkan indikator transparansi dan inklusivitas.

Metode ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun RKPDES yang berbasis partisipasi dan transparansi, sehingga pembangunan desa lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) melalui pendekatan pendampingan partisipatif dan berbasis transparansi. Hasil temuan utama yang diperoleh dalam program ini mencakup:

- 1. Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa tentang RKPDES**
 - a. Sebelum program dimulai, tingkat pemahaman aparatur desa mengenai penyusunan RKPDES masih terbatas, dengan hanya 35% dari total peserta yang memahami secara mendalam tahapan penyusunan RKPDES.
 - b. Setelah dilakukan pendampingan partisipatif, pemahaman mereka meningkat signifikan menjadi 85% (Tabel 1).
- 2. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKPDES**
 - a. Sebelum pendampingan, hanya 25% masyarakat yang terlibat dalam proses penyusunan RKPDES.
 - b. Setelah program berjalan, keterlibatan masyarakat meningkat hingga 75%, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah partisipasi dalam musyawarah desa.
- 3. Peningkatan Transparansi dalam Penyusunan RKPDES**

- a. Sebelum program, hanya 40% masyarakat yang merasa bahwa penyusunan RKPDES dilakukan secara transparan.
- b. Pasca pendampingan, 80% masyarakat mengakui adanya transparansi dalam penyusunan RKPDES, terutama setelah penerapan sistem informasi desa berbasis daring.

Dengan adanya pelatihan dan pendampingan, proses penyusunan RKPDES yang sebelumnya memakan waktu rata-rata 3 bulan, kini dapat diselesaikan dalam 1,5 bulan dengan kualitas perencanaan yang lebih baik.

Tabel 1. Efektivitas Penyusunan RKPDES

Aspek Evaluasi	Sebelum Pendampingan (%)	Setelah Pendampingan (%)
Pemahaman tentang RKPDES	35	85
Keterlibatan Masyarakat	25	75
Transparansi Proses	40	80
Efektivitas Waktu	3 bulan	1,5 bulan

Peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap RKPDES menunjukkan efektivitas pendekatan pendampingan partisipatif. Menurut teori perencanaan partisipatif (Arnstein, 1969), semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam suatu perencanaan, maka semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini terbukti dari hasil temuan yang menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, transparansi dalam penyusunan RKPDES juga mengalami perbaikan signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra et al. (2020), yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi desa berbasis digital mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan desa. Dengan meningkatnya transparansi, terjadi pergeseran pola pikir aparatur desa dari yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi lebih inklusif dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat.

Dampak dari hasil pengabdian ini juga dapat dilihat dalam perubahan perilaku aparatur desa dalam menyusun RKPDES. Sebelum program ini dilaksanakan, penyusunan RKPDES sering kali dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat. Namun, setelah pendampingan, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa.

Hal ini membuktikan bahwa tujuan program pengabdian telah tercapai dengan baik, yaitu menciptakan sistem penyusunan RKPDES yang lebih partisipatif dan transparan.

Dengan demikian, hasil pengabdian ini secara nyata telah mampu mengatasi permasalahan utama dalam penyusunan RKPDES di Desa Selebung, yaitu kurangnya pemahaman aparaturnya desa, minimnya keterlibatan masyarakat, serta rendahnya tingkat transparansi. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan perubahan pola pikir aparaturnya desa serta masyarakat, diharapkan perencanaan pembangunan desa ke depan akan lebih efektif, inklusif, dan akuntabel.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Penyusunan RKPDES

Kesimpulan

Program pengabdian ini berhasil meningkatkan kapasitas aparaturnya desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) melalui pendekatan pendampingan partisipatif dan berbasis transparansi. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa dengan metode ini, aparaturnya desa lebih memahami prinsip-prinsip perencanaan yang inklusif, berbasis data, serta akuntabel. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran dan keterampilan dalam menyusun RKPDES yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi yang berlaku. Pendekatan partisipatif yang diterapkan memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan masukan, sehingga rencana kerja yang disusun lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan lokal. Transparansi dalam proses penyusunan juga mendorong peningkatan akuntabilitas pemerintah desa, yang berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pembangunan desa.

Untuk keberlanjutan program, diperlukan pendampingan lanjutan bagi aparaturnya desa guna memperdalam pemahaman dan keterampilan dalam implementasi RKPDES yang telah disusun. Selain itu, perlu adanya penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis partisipasi masyarakat agar efektivitas pelaksanaan RKPDES dapat terukur dengan baik. Kolaborasi dengan pihak akademisi, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil juga dapat diperluas untuk mendukung peningkatan kapasitas aparaturnya desa secara berkelanjutan. Selain itu, pengembangan platform digital untuk transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan desa dapat menjadi langkah inovatif guna memperkuat tata kelola pemerintahan

desa yang lebih efektif dan terbuka.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah beserta jajaran pemerintah Desa Selebung yang telah meluangkan waktu dan bekerjasama sehingga program pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar. ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi yang telah memberikan bantuan pendanaan untuk terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Referensi

- Vestikowati, E., Endah, K., & Hidayat, E. S. (2020). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Arma, N. A., Sopang, J., & Jaffisa, T. (2020). Peningkatan Aparatur Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kota Rantang. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Setiadi, S., Ekawati, H., & Habib, F. (2020). Pelatihan dan Pendampingan bagi Peningkatan Kapasitas Aparat dan Institusi Desa dalam Perencanaan dan Implementasi Pembangunan. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1).
- Suyanto. (2023). Pemberdayaan Aparat Pemerintahan Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Batoboh*, 8(2),
- Wardana, D., & Zainal. (2021). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(2),
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa